

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Ni Wayan Ratna Dewi¹
I Dewa Gede Dharma Suputra²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
email: ratnadewi2259@gmail.com/ telp: +62 85739743627

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Populasi dalam penelitian ini adalah delapan kabupaten dan satu kota di provinsi Bali periode 2011-2014 dan menggunakan metode sampling jenuh. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari dokumen Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, yaitu Laporan Realisasi APBD dan PDRB atas Harga Konstan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; dana alokasi umum dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

The purpose of this study is to understand the influence of region original revenue, general fund allocation, specific fund allocation, capital expenditure to economic growth. The population in this study were eight counties and one city in Bali during the period of 2010 – 2014 and using saturation sampling methods. The data used in this research is secondary data obtained from the document of Badan Pusat Statistik of Bali Province, the budget realization report and GDRPat constant prices. The analytical method used multiple linear regression analysis. The results show that region original revenue and specific fund allocation has negative effects on the economic growth; general fund allocation and capital expenditure has no effects on the economic growth.

Keywords: *Region Original Revenue, General Fund Allocation, Specific Fund Allocation, Capital Expenditure, and Economic Growth.*

PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah merasakan dampak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Sistem otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan mengurangi campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan ini didukung dengan

dikeluarkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 (kemudian menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004) tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi Undang-Undang No.33 Tahun 2004) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2010). Todaro (2000) mengatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan perubahan struktural dan sektoral yang tinggi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2006). Darise (2009:48) mengartikan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang didapat daerah dari pemungutan atas dasar tata tertib daerah yang berdasarkan pada susunan perundang-undangan. Menurut Mamesah (1995) menyatakan besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

Desentralisasi juga membawa perubahan pemikiran mengenai perimbangan keuangan daerah dan pusat, dengan mengubah prosedur penyaluran dana antara sentral dengan regional. Menurut Syukriy dan Halim (2003) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari

sumber ekonomi asli daerah seperti pajak, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain.

Brata (2004) menyatakan bahwa terdapat komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yaitu PAD. Apabila peningkatan PAD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka terdapat kemungkinan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena nilai DAU dan DAK pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD.

Pemerintah Pusat mengeluarkan dana perimbangan berupa dana alokasi umum untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur yang ada pada setiap daerah agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No.33 Tahun 2004). DAU merupakan sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah, DAU bisa didistribusikan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antar daerah baik horizontal maupun vertikal (Gan, Wang, Chen, 2005).

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang No. 33 tahun 2004).

Ollukayode (2009) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah merupakan salah satu instrument strategis dalam perekonomian. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat unsur pendapatan dan belanja. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. pada dasarnya alokasi belanja modal digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan ataupun untuk fasilitas publik.

Belanja modal memiliki peran penting dalam meningkatkan infrastruktur publik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi nilai rasio belanja modal maka semakin tinggi pula diharapkan dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut (BPS, 2015).Mardiasmo (2009:93) menyatakan bahwa secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan.

Permanasari (2013) menemukan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan dana alokasi khusus dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Putri (2015) menemukan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan dana alokasi umumnya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun Harianto dan Adi (2007) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan

Anasmen (2009), menunjukkan bahwa belanja modal tidak signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB). Namun Gunantara (2014) menunjukkan Belanja modal berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di provinsi Bali. Penelitian ini dimotivasi karena adanya ketimpangan pendapatan antara Bali bagian selatan dengan Bali bagian lainnya serta adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini bermaksud untuk mereplikasi dan mengeksplorasi penelitian yang dilakukan oleh Maryati, Ulfi dan Endrawati (2010) yang meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Sumatera Barat). Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan variabel belanja modal sebagai variabel bebas.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis dan praktis. Mafaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih luas mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah mengenai Pengaruh Pendapatan

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian ini menggunakan teori keagenan dan Teori *Fiscal Federalism* sebagai dasar teori utama. Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori ini terdapat perbedaan antara kepentingan agen dan prinsipal, sehingga pihak agen mungkin saja melakukan tindakan tidak baik kepada kepentingan pihak prinsipal. Prinsipal mendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusannya kepada agen, dimana wewenang dan tanggung jawab tersebut diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Teori keagenan telah dipraktikan di organisasi publik khususnya di pemerintahan daerah. Dalam sektor publik yang berperan sebagai agen adalah pemerintah daerah dan prinsipalnya adalah masyarakat yang diproyeksikan oleh DPRD. Semestinya pemerintah daerah sebagai pihak agen bertindak sesuai dengan kehendak prinsipalnya (masyarakat). Tetapi kenyataannya tidak selalu demikian, terkadang pemerintah (agen) berperilaku oportunis dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan publik. Hal tersebut sesuai dengan teori keagenan bahwa antara agen dan prinsipalnya tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dan agen cenderung melakukan suatu tindakan untuk memaksimalkan utilitasnya. Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara

masyarakat yang di proksikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat melakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sehingga sebagai konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya membantu pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari maupun member pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Teori keagenan tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah selaku agen sudah seharusnya memberikan timbale balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Teori *Fiscal Federalism* menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan jalan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Teori *Fiscal Federalism* adalah teori yang dikembangkan oleh Hayek (1945), Musgrave (1959) dan Oates (1972). Desentralisasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan kewenangan terkait dengan pengambilan keputusan kepada pemerintah tingkat rendah (Akai & Sakata, 2002). Secara teoritis desentralisasi fiskal merupakan devolusi tanggung jawab fiskal dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dapat meningkatkan atau mengurangi ekonomi pertumbuhan (Bodman *et al.* 2009). Fungsi utama dari desentralisasi fiskal yaitu

meningkatkan efisiensi sektor publik dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Faridi, 2011).

Menurut Penthury (2011), dalam desentralisasi fiskal pemerintah daerah harus mampu memberikan fasilitas pelayanan publik dengan baik untuk seluruh masyarakat lokal. Infrastruktur merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi, dengan menyiapkan infrastruktur yang baik maka akan meningkatkan produktivitas (Modebe *et al*, 2012). Pemerintah dapat menyediakan infrastruktur ekonomi untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan alokasi sumber daya, dan meningkatkan produktivitas ekonomi (Albatel, 2000).

Desentralisasi fiskal dikatakan menawarkan sejumlah manfaat bagi tata kelola sektor publik, termasuk pertumbuhan, akuntabilitas, dan responsivitas para pejabat pemerintah terhadap tuntutan lokal dan kebutuhan (Amagoh & Amin, 2012). Desentralisasi fiskal dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: otonomi fiskal pemerintah daerah, dan pentingnya fiskal pemerintah daerah. Otonomi fiskal pemerintah daerah berkaitan dengan transfer fiskal antar pemerintah. Pinjaman daerah dan tanggung jawab untuk penyediaan barang dan jasa publik, sedangkan kepentingan fiskal terhubung langsung dengan tingkat tanggung jawab pengeluaran pemerintah daerah terhadap tingkat dari seluruh pengeluaran pemerintah (Aristovnik, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang oleh PAD terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat (Ardiansyah dan Vitalis 2014). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, pendapatan asli daerah bersumber dari: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari keempat sumber pendapatan asli daerah tersebut, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi daerah (Olatunji, *et al*, 2009).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi -potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2006). Prantini (2014) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Putri (2015) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian yang dihasilkan sebagai berikut.

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

(Undang-Undang No.33 Tahun 2004).DAU sering disebut dengan bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*) karena merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu (Ardiansyah dan Vitalis, 2014).DAU tersebut digunakan untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur yang ada pada setiap daerah serta agar terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang merata. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gunantara (2014) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Permasari (2013). Berdasarkan uraian diatas, hipotesis penelitian yang dihasilkan sebagai berikut.

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud yaitu: (i) Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, seperti kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigrasi primer, dan (ii) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa daerah yang akan menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNS daerah. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah sedangkan kriteria teknis di susun oleh menteri teknis terkait dalam bentuk indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Dalam hal kegiatan yang didanai dengan DAK adalah kegiatan yang bersifat kegiatan fisik, maka daerah penerima DAK wajib menganggarkan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK yang diterima (Siregar, 2001).

Apabila PAD berpengaruh padapertumbuhan ekonomi, maka kemungkinan bahwa DAK juga berpengaruh positifterhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai DAK pada umumnya lebih besardibandingkan kontribusi PAD.Berdasarkan penelitian Santosa (2013) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis penelitian yang dihasilkan sebagai berikut.

H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja operasional. Belanja modal dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok

yaitu: (1) Belanja Publik adalah belanja yang manfaatnya dapat langsung dinikmati masyarakat misalnya: pembangunan jembatan, pembelian mobil ambulan untuk umum dan lain-lain. (2) Belanja Aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak dinikmati langsung oleh masyarakat tetapi dapat dirasakan langsung oleh aparatur seperti: pembangunan gedung dewan, pembelian mobil dinas dan lain-lain.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, misalnya dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

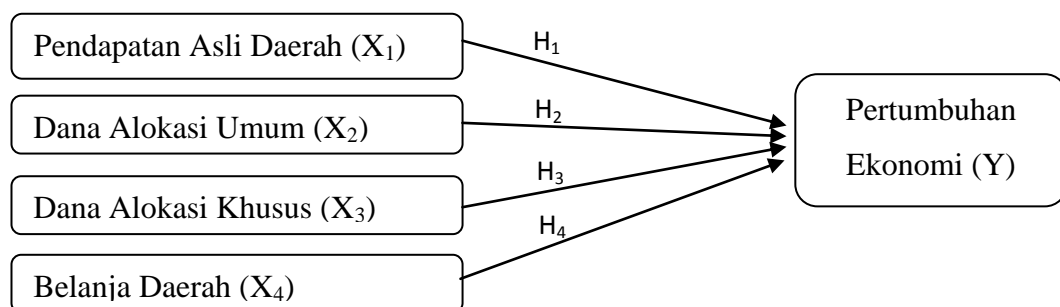
Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Menurut Bati (2009), peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Lindan Liu (2000) mengatakan bahwa pemerintah dipandang perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Secara umum, peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan per kapita. Uraian tersebut juga didukung oleh penelitian Prantini (2014) belanja modal berpengaruh positif terhadap

pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian yang dihasilkan sebagai berikut.

H₄: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Menurut Sugiyono (2010:13), pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian berbentuk asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Rahyuda, dkk., 2004:17). Desain penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1.
Desain Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Obyek dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi pada empat tahun terakhir, yaitu tahun 2011-2014.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka (Sugiyono, 2010:14). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD pada

Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2014 dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB atas dasar harga konstan). Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali yaitu Laporan Realisasi APBD Tahun 2011-2014 dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB atas dasar harga konstan).

Populasi dalam penelitian ini adalah delapan Kabupaten dan satu kota yang terdapat di Provinsi Bali Periode Tahun 2011-2014. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi yaitu delapan Kabupaten dan satu kota yang ada di Provinsi Bali periode tahun 2011-2014. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan. Dalam metode observasi non partisipan ini, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Variabel dependen/terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y). Pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, yang dihitung dengan rumus (Bappenas, 2003):

$$PDRB = \frac{PDRB (t) - PDRB (t-1)}{PDRB (t-1)} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

PDRBt = Produk Domestik Bruto Tahun Sekarang

PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto Tahun Sebelumnya

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), Belanja Modal (X4). PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Penda patan Daerah}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

Dana Alokasi Umum dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio DAU} = \frac{\text{Realisasi DAU}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Dana Alokasi Khusus dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio DAK} = \frac{\text{Realisasi DAK}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

Sedangkan Belanja Modal dapat dihitung dengan menggunakan rumus (BPS,2015):

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots(5)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Teknik tersebut digunakan untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Model analisis regresi linier berganda ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon \dots\dots\dots(6)$$

Keterangan:

- Y = Pertumbuhan Ekonomi
- α = Konstanta
- X₁ = Pendapatan Asli Daerah
- X₂ = Dana Alokasi Umum
- X₃ = Dana Alokasi Khusus
- X₄ = Belanja Modal
- ε = Error
- β₁β₂β₃β₄ = koefisien regresi untuk masing-masing variabel

Tahap analisis yang dilakukan antara lain: statistik deskriptif; uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak, uji multikolinearitas untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya indikasi berupa korelasi antar variabel bebas, uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah model regresi terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, uji autokorelasi untuk menguji model regresi linier tentang pengaruh data dari pengamatan sebelumnya; analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis yang terdiri atas uji koefisien determinasi (R^2), uji kesesuaian model (uji-F), uji signifikansi parsial (uji-t).

Statistik deskriptif bertujuan memberikan informasi mengenai karakteristik variabel yang diteliti yang dilihat dari jumlah pengamatan, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi masing-masing variabel penelitian. Hasil statistik deskriptif penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 1. sebagai berikut.

Tabel 1.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	36	,0423	,7869	,236050	,2118545
DAU	36	,0849	,6563	,490419	,1585237
DAK	36	,0001	,0625	,038497	,0207938
BM	36	,0707	,2897	,146778	,0532373
PE	36	,0543	,1640	,072331	,0252012
Valid N (listwise)	36				

Sumber: data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 1. Pendapatan asli daerah sebagai variabel independen memiliki nilai rata-rata 23,6% dan nilai standar deviasisebesar 21,18% yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum 4,23% dan nilai maksimum 78,69%. Nilai minimum ini dimiliki oleh

Kabupaten Bangli tahun 2010 dan nilai maksimum dimiliki Kabupaten Badung tahun 2014. Variabel dana alokasi umum sebagai variabel independen memiliki nilai rata-rata 49,04% dan nilai standar deviasi sebesar 15,85% yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Dana alokasi umum memiliki nilai minimum 8,49% dan nilai maksimum 65,63%. Nilai minimum ini dimiliki oleh Kabupaten Badung tahun 2010 dan nilai maksimum dimiliki Kabupaten Buleleng tahun 2014. Variabel dana alokasi khusus sebagai variabel independen memiliki rata-rata nilai 38,49% dan nilai standar deviasi sebesar 20,79% yang lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata. Dana alokasi khusus memiliki nilai minimum 0,01% dan nilai maksimum 6,25% . Nilai minimum ini dimiliki oleh Kabupaten Badung tahun 2011 dan nilai maksimum dimiliki oleh Kabupaten Buleleng tahun 2013. Variabel belanja modal sebagai variabel independen memiliki nilai rata-rata 14,67% dan standar deviasi sebesar 53,23% yang lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata. Belanja modal memiliki nilai minimum 7,07% dan nilai maksimum 28,97%. Nilai minimum dimiliki oleh Kabupaten Klungkung tahun 2010 dan nilai maksimum dimiliki oleh Kabupaten Badung tahun 2014.

Variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen memiliki nilai rata-rata 72,33% dan nilai standar deviasi sebesar 25,2% yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimum 5,43% dan nilai maksimum 16,4%. Nilai minimum ini dimiliki oleh Kabupaten Bangli tahun 2010 dan nilai maksimum dimiliki Kota Denpasar tahun 2014.

Uji asumsi klasik diperlukan agar model regresi yang dijadikan alat estimasi tidak bias. Uji Asumsi Klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov test* yang disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,01269232
Most Extreme Differences	Absolute	,124
	Positive	,124
	Negative	-,079
Test Statistic		,124
Asymp. Sig. (2-tailed)		,176 ^c

Sumber: data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 2 nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* model persamaan yang diuji sebesar 0,17 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan data dari model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Adapun hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Toleranc e	VIF
1	PAD	213	4,689
	DAU	,256	3,910
	DAK	,489	2,046
	BM	,724	1,382

Sumber: data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* untuk setiap variabel yang diujikan $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak saling berkorelasi dan hasil pengujian ini juga menggambarkan asumsi multikolinearitas terpenuhi.

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji model regresi linier tentang pengaruh data dari pengamatan sebelumnya. Jika suatu model regresi mengandung gejala autokorelasi, maka prediksi yang dilakukan dengan model tersebut akan tidak baik atau dapat memberikan hasil prediksi yang menyimpang. Hasil dari uji autokorelasi pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4.
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,864 ^a	,746	,714	,0134863	1,809

Sumber: data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji autokorelasi memperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,809 sedangkan tabel Durbin-Watson dengan $n = 36$ dan $k = 4$ menunjukkan nilai $d_L = 1,24$ dan $d_u = 0,73$ sehingga $4 - d_u = 3,27$. Nilai *d-statistic* berada diantara d_L dan d_u ($1,24 < 1,809 < 3,27$) maka pengujian dengan *Durbin Waston* (DW) berada pada daerah tidak terdapat autokorelasi sehingga model regresi yang digunakan tidak terdapat gejala autokorelasi.

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung gejala heteroskedastisitas atau

mempunyai varian yang homogen. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5.
Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,039	2,411		,431	,670
PAD	1,418	2,918	,462	,486	,631
DAU	1,078	3,583	,263	,301	,765
DAK	-16,194	11,339	-,518	-1,428	,163
BM	-3,341	2,263	-,274	-1,476	,150

Sumber: data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal yang diujikan tersebut berada diatas 5% atau 0,05 sehingga dapat disimpulkan model regresi yang ada bebas heteroskedastisitas.

Tabel 6.
Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,252	,061		4,117	,000
PAD	-,236	,074	-1,987	-3,193	,003
DAU	-,088	,091	-,556	-,972	,339
DAK	-2,322	,288	-1,916	-8,075	,000
BM	,062	,057	,130	1,076	,290
Adjusted R Square					0,714
F hitung					22,804
Signifikansi F					0,000

Sumber: data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 6 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 0,252 - 0,236X_1 - 0,088X_2 - 2,322X_3 + 0,062X_4 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut. Nilai konstanta sebesar 0,252 menunjukkan bahwa apabila nilai PAD(X_1),

DAU(X_2), DAK(X_3) dan BM(X_4) sama dengan nol, maka nilai pertumbuhan ekonomi (Y) sama dengan sebesar 0,252 satuan. Nilai koefisien $\beta_1 = -0,236$ menunjukkan bahwa apabila nilai pendapatan asli daerah (X_1) bertambah 1 satuan, maka nilai dari pertumbuhan ekonomi (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,236 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Nilai koefisien $\beta_2 = -0,088$ menunjukkan bahwa apabila nilai dana alokasi umum (X_2) bertambah 1 satuan, maka nilai dari pertumbuhan ekonomi (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,088 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Nilai koefisien $\beta_3 = -2,322$ menunjukkan bahwa apabila nilai dana alokasi khusus (X_3) bertambah 1 satuan, maka nilai dari pertumbuhan ekonomi (Y) akan mengalami penurunan sebesar -2,322 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Nilai koefisien $\beta_4 = 0,062$ menunjukkan bahwa apabila nilai belanja modal (X_4) bertambah 1 satuan, maka nilai dari pertumbuhan ekonomi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,062 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Hasil uji regresi linear berganda terdiri atas, uji kelayakan model (uji F), koefisien determinasi (*adjusted R²*) dan uji signifikansi parsial (uji t). Koefisien determinasi (*Adjusted R²*). Sesuai dengan Tabel 6, dapat dilihat hasil uji koefisien determinasi dengan nilai *adjusted R²* sebesar 0,714 hal ini berarti 7,14% variasi pertumbuhan ekonomi (Y) dipengaruhi oleh variasi pendapatan asli daerah (X_1) dan dana alokasi umum (X_2), dana alokasi khusus (X_3) dan belanja modal (X_4) sisanya sebesar 92,86% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Uji kelayakan model (uji F). Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 6, terlihat bahwa hasil variabel bebas berpengaruh serempak (simultan) terhadap

variabel terikat yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti seluruh variabel bebas, yaitu pendapatan asli daerah (X_1) dana alokasi umum (X_2), dana alokasi khusus (X_3) dan belanja modal (X_4) dapat memprediksi atau menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini layak untuk diteliti.

Uji signifikansi parsial (uji-t). Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas pada variabel terikat. Berikut adalah kesimpulan yang diperoleh dari hasil uji signifikansi parsial yang telah ditampilkan dalam Tabel 6. Pengaruh pendapatan asli daerah pada pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai t sebesar -3,193 dengan signifikansi t 0,003 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini berarti H_1 ditolak, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah menurut Mardiasmo dalam Fisanti (2013) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari sumber terlihat bahwa penarikan pajak dan retribusi daerah justru berakibat pada output daerah yang tercermin pada PDRB yang dihasilkan berbagai sektor pendapatan di Kabupaten Kota tidak berjalan secara maksimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakarsa dan Iswan (2014), serta Putri dan Toto (2015) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh dana alokasi umum pada pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai t sebesar -0,972 dengan signifikansi t 0,339 lebih besar dari 0,05. Hasil ini

berarti H_2 ditolak, artinya Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan DAU yang diterima oleh daerah tidak digunakan untuk kegiatan yang bertujuan pemerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah, sehingga peran DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Seharusnya DAU yang diterima daerah dialokasikan untuk belanja pembangunan sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi DAU tersebut dialokasikan untuk belanja rutin, sehingga alokasi tersebut tidak tepat sasaran. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa (2013) dan Paseki (2014) bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh dana alokasi khusus pada pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai t sebesar -8,075 dengan signifikansi t 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini berarti H_3 ditolak, artinya Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh DAK sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang bisa jadi bukan menjadi prioritas pemerintah daerah yang bersangkutan pada tahun berjalan. DAK tidak secara langsung berhubungan dengan faktor-faktor yang secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi seperti jalan dan jembatan. Selain itu, adanya kewajiban penyediaan dana pendamping sebesar 10% dari total nilai alokasi DAK pada APBD tentunya akan menggeser sejumlah anggaran belanja tertentu yang kemungkinan sebenarnya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azzahra (2015) bahwa dana alokasi khusus

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa (2013) yaitu dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh belanja modal pada pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai t sebesar 1,076 dengan signifikansi t 0,290 lebih besar dari 0,05. Hasil ini berarti H_4 ditolak, artinya Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena belanja modal yang digunakan pemerintah daerah dialokasikan pada belanja infrastruktur yang kurang produktif, selain itu dapat juga disebabkan hasil alokasi belanja modal belum dapat dinikmati dalam kurun waktu yang pendek/pembangunan infrastruktur masih berjalan sehingga belum memperoleh hasil dari belanja modal tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permasari (2013) dan Iskandar (2012) bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prantini (2014) yaitu belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan Pendapatan Asli daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan simpulan yang telah dibuat dan hasil analisis, maka diajukan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut. Pemerintah daerah diharapkan agar lebih mengembangkan potensi dan sektor-sektor ekonomi daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah agar lebih mandiri secara finansial dalam mendanai seluruh aktivitas pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal dengan sebijak mungkin untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang akan meningkatkan produktivitas publik. Penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti (dana bagi hasil dan lainnya).

REFERENSI

- Akai, N. and Sakata, M. 2002. Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence form State Level Cross Section Data for the United States. *Journal of Urban Economics*, 52, pp: 93-108.
- Albatel, Abdullah H. 2000. The Relationship between government expenditure and economic growth in Saudi Arabia. *Journal of King Soud University, Administrative Sciences*, 12 (2), pp: 173-191.
- Amagoh, Francis & Aloysius Ajab Amin. 2012. An Eximination of the Impacts of Fiscal Decentralization on Economic Growth. *International Journal of Business Administration*, 3(6), pp: 72-81.
- Anasmen. 2009. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat : 2000-2006. *Tesis*. Fakultas Ekonomi Program Studi Perencanaan dan Kebijakan Publik Kekhususan Ekonomi Keuangan Negara Dan Daerah Universitas Indonesia.
- Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks

Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram.

Aristovnik, A. 2012. Fiscal Decentralization in Eastern Europe: a twenty-year perspective. *MPRA Paper No. 39316*, University of Ljubljana, Faculty of Administration, Slovenia.

Azzahra, Annora. 2015. Pepengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2012. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim. Malang.

BAPPENAS. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: tinjauan Alas Kinerja PAD dan Upaya Yang Dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2015. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali 2010-2014. *Katalog BPS: 7203005.51*.

Bati. 2009. Pengaruh Belanja Modal dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Sumatra Utara). *Tesis*. USU Medan

Bodman, P., Kelly Ana Heaton and Andrew Hodge. 2009. Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Bayesian Model Averaging Approach. *MRG@UQ Discussion Paper, School of Economics*, University of Queensland.

Brata, Aloysius Gunadi. 2004. Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.

Faridi, M. Zahir. 2011. Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 31(1), pp: 1-33.

Gan, Wang, Chen (2005), "Intergovernmental Fiscal Transfer System a New Model From a Comparison Between Sweden and China". Kristianstad University.

Gunantara, Putu Candra dan A.A.N.B. Dwirandra. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi di Bali. *E-Jurnal Akuntansi Unud 7.3 (2014) : 529-546*.

- Harianto dan Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Hayek, Friedrich. 1945. The Use of Knowledge in Society. *American Economic Review* 35: 519-530.
- Iskandar, Maolana Amir. (2012). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. (Studi empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Periode 2006-2010. *Skripsi*. Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Jensen, M. C and Meckling, W.h.1976. *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Econpmics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. Available from: <http://papers.ssrn.com>
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi Daerah, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change*. Chicago. Vol 49. Hal : 1-21.
- Mamesah, D,J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Maryati, Ulfi dan Endrawati. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat*. *Jurnal Akuntansidan Manajemen*, vol 5, No. 2, Desember 2010.
- Modebe, N. J., Regina G. Okafor, J. U. J. Onwumere and Imo G. Ibe. 2012. Impact of Recurrent and Capital Expenditure on Nigeria's Economic Growth. *European Journal of Business and Management*, 4 (19), pp: 66-74.
- Musgrave, Richard. 1959. *Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*, New York: McGraw.
- Oates, W.E. 1972. Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal* 46.

- Olatunji, O. C., O. Asaolu Taiwo and J. O. Adewoye. 2009. A Review of Revenue Generation in Nigeria Local Government: A Case Study of Ekiti State. *Journal of International Business Management*, 3(3), pp: 54-60.
- Olukayode, M. E. 2009. Does Government Spending Spur Economic Growth in Nigeria. *MPRApaper* No. 17941
- Paseki, Meilen Greri, Amran Naukoko dan Patrick Wauran. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 14 no. 3 - Oktober 2014*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Penthury, M. A. 2011. Flypaper Effects Anomaly Of West Papua Capital Public Expenditure. *Economic Journal Of Emerging Markets*, 3(3), pp: 289-297.
- Permanasari, Windha Amiga. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2009-2011). *Artikel Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putri, T. D. dan Toto G. 2015. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Perkembangan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2000—2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 4, No. 3: 301—326
- Putri, Zuwesty Eka. 2015. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 5, No. 2.
- Prakarsa, F. D. dan Iswan N. 2014. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. vol. 2, No. 2.
- Prantini. 2014. Analisis Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. *Tesis*. Magister Ekonomi (M.E) pada Program Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura.
- Rahyuda, I Ketut, IGW Murjana Yasa dan I Nyoman Yuliarmi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Denpasar: Universitas Udayana Press.

- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Santosa, Budi. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. Universitas Trisakti Jakarta.
- Siregar, Baldric dan Siregar Bonni. 2001. *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Syukriy, Abdullah dan Abdul Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah. Dalam *Simposium Nasional Akuntansi VI*, 1140-1159.
- Tambunan, Tulus. 2006. *Upaya-upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah* .
www.kardin-indonesia.or.id. Diakses : 28 Januari 2016.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ketujuh Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.